

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periodeisasi kajian politik pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam, bergantung pada periodisasi kesejarahan perjalanan bangsa. Pasalnya, politik pendidikan dipandang sebagai kepentingan lokal dan penciptaan identitas kebudayaan negara. Indonesia sendiri, sudah mengalami beberapa fase kesejarahan bangsa; *pertama*, pra-kemerdekaan (kolonialisme/penjajahan). Di era ini, diungkapkan oleh HAR. Tilaar, fungsi lembaga pendidikan adalah gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.¹ Kala itu, kelompok pemuda terdidik di lembaga pendidikan, berkumpul dan menyusun strategi untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan. Dalam konteks pendidikan Islam pun sama, Pondok Pesantren, sebagai sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, berkontribusi untuk menyulut semangat perlawanan terhadap penjajah.² *Kedua*, fase kemerdekaan atau sering disebut Orde Lama. Di masa kemerdekaan, posisi pendidikan ada dipersimpangan. Meskipun sudah merdeka, pemerintah sendiri belum menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut. Pederbatan kala itu adalah sistem negara Islam dan demokrasi. Akhirnya, kompromi dilakukan. Indonesia menyebut dirinya sebagai negara Pancasila yang mengakomodasi kepentingan kelompok nasionalis, dan religius. Di dunia pendidikan pun sama, pendidikan Agama

¹ HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kebudayaan* (Bandung: Rinneka Cipta, 2001), 34

² Abdurrahman Mas'ud, *Politics of The Nation and Madrasah's Policy*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta 3-5 September 2013.

atau keagamaan diakomodasi melalui Kementerian Agama, dan adapun sistem pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Pendidikan.

Ketiga, masa pembangunan atau Orde Baru. Di masa ini, politik pendidikan masih menganut sistem akomodatif terhadap dua model pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Lama. Namun, kedigdayaan peranan pemerintah, kala itu, cenderung lebih mengutamakan pendidikan umum. Artinya, pendidikan agama di masa orde baru, tidak banyak mendapat perhatian pemerintah. Eksistensi pendidikan Islam lebih mandiri dibandingkan sekolah yang disokong penuh pemerintah. Maklum, mayoritas lembaga pendidikan Islam – seperti pesantren dan madrasah – lebih banyak dikelola oleh swasta atau swadaya masyarakat. Hal yang disayangkan juga, para politisi muslim yang duduk diparlemen juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam.³ M. Sirozi mengatakan bahwa peranan para politisi muslim diamputasi oleh kekuatan kelompok nasionalis di Orde Baru. Politisi muslim di parlemen hanya mengisi kelompok minoritas.⁴

Fase *keempat*, pergolakan politik nasional lebih menekankan pada aspek demokrasi liberal. Sebuah model demokrasi yang mengedepankan pada kebebasan tanpa batasan. Semua orang bisa berekspresi, berpendapat, bertindak, dan bersekutu. Di era ini, pemerintah kehilangan taringnya dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator terhadap kebutuhan masyarakat,

³ *Ibid.*, 4

⁴ M. Sirozi, *Peran Politik Islam di Masa Orde Baru; Studi Terhadap Perumusan Sistem Pendidikan Nasional 1989* (Jakarta ; Rajagrafindo Persada, 2010), 34

khususnya dari sisi akses pendidikan. Di era ini, tak ada lagi dikotomi yang mencolok antara pendidikan umum dan agama. Lembaga pendidikan agama – seperti pondok pesantren - berlomba-lomba untuk mendirikan sekolah umum, untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam.

Mitologi yang terbangun di era reformasi – atau sebagian ilmuwan menyebut demokrasi tanpa batas ini – adalah otonomisasi dan demokratisasi kewenangan pusat pada masyarakat secara penuh. Artinya, dalam konteks pendidikan, kekuasaan terkuat adalah pada kepala sekolah, stake-holder, dan masyarakat. Begitupula demokratisasi, pemerintah tidak berhak menentukan seorang kepala sekolah sesuka keinginannya, melainkan melalui proses pemilihan di sekolah tersebut. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membangun standarisasi kualitas pendidikan agar mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. HAR. Tilaar mengatakan, di era reformasi kebijakan Standarisasi Pendidikan Nasional yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari proses otonomisasi dan demokratisasi. Dengan standarisasi ini, pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan sekolah dalam mengemban tugasnya.⁵

Perlu diakui, bahwa proses demokratisasi dan pendelegasian kewenangan ke tingkat paling mikro dalam manajerialisme pendidikan, adalah sebuah keniscayaan di era globalisasi. Dimana, globalisasi seringkali diasumsikan sebagai era yang mengedepankan pada aspek *competitiveness*, partisipasi aktif masyarakat, dan standarisasi kualitas yang terukur. Namun, di

⁵HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan manajemen pendidikan nasional dalam puseran kekuasaan* (Jakarta : Rinneka Cipta, 2009). 55

sisi lain, ketidak hadirannya pemerintah yang dominan di dalam pengelolaan pendidikan juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah yang terjadi di beberapa lembaga Pendidikan Islam. Saat ini, pendidikan Islam cenderung *split* atau bergeser dari tugas utamanya: yakni sebagai sub-sistem pendidikan nasional yang mengedepankan kepentingan nasional dan penumbuhan sikap nasionalisme.

Dari berbagai penelitian, dalam ataupun luar negeri, menunjukkan adanya pertumbuhan lembaga pendidikan Islam yang sangat pesat, pada era reformasi ini. Lebih-lebih lembaga pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga pendidikan Islam, secara antropologis, terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, penambahan dari institusi yang sudah ada sebelumnya. *Kedua*, lembaga-lembaga baru yang dimotori oleh gerakan sosial. Robert Hefner membagi tiga model lembaga pendidikan Islam; Langgar atau tempat pengajian al-Qur'an, pondok pesantren, dan madrasah. Lembaga-lembaga sudah ada dari zaman kemerdekaan. Namun, akhir-akhir ini, sebut Hefner, terdapat lembaga pendidikan baru yang beraviliasi dengan *social movement*.⁶ Pada penelitian sebelumnya, tentang Politik Multikulturalisme di Asia Tenggara, Hefner juga menunjukkan bahwa ada beberapa lembaga pendidikan – khususnya pesantren – yang memiliki sistem indoktrinasi radikalisme Islam. Oleh karenanya, dia merekomendasikan perlu adanya kontrol pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Islam. Meskipun, dalam buku tersebut, juga

⁶ Robert W. Hefner, "Islamic Education and Social Movement" dalam *Modernization in Moslem World* (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2011),98

disebut tanggapan Jusuf Kalla, yang menyebut tidak semua pesantren melakukan tindakan radikalisme.⁷

Bukan hanya Robert Hefner yang menyayangkan perkembangan demokrasi di Indonesia ‘ternodai’ oleh munculnya gerakan radikalisme Islam. Peneliti seperti Martin Van Buirennessen, Greg Fealy dan Antoni Bubalo, dan peneliti lainnya, memberikan catatan yang sama. Yakni pendidikan Islam di Indonesia cenderung digunakan sebagai alat transformasi kekuatan-kekuatan radikalisme dan fundamentalisme. Demokrasi memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat untuk berekspresi dan berserikat, dalam konsepsi pemenuhan hak dasar kemanusiaan. Tapi disisi lain, demokratisasi ini cenderung ‘diselewengkan’ oleh sebagian kelompok untuk membangun kekuatan baru (*social movement*) untuk menghilangkan kekuasaan negara.⁸

Keresahan terhadap beberapa lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir juga *concern* mengungkap beberapa lembaga-lembaga yang berpotensi memiliki ancaman ideologis. Penelitian ini terfokus pada lembaga pendidikan pasca-reformasi. Yakni pendidikan Islam yang dibangun oleh tokoh dan kelompok tertentu. Walaupun mereka (para pendirinya) menggunakan *idiom* kebahasan klasik. Seperti pondok pesantren, madrasah, dan Yayasan Pendidikan Islam (YPI). Hasil penelitiannya pun menunjukkan hasil serupa. Hingga mereka

⁷ Robert W. Hefner, *The politic of multiculturalism*, (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2001), 12

⁸ Greg Fealy dan Anthony *Jejak Kafilah* terj. Akh. Muzaki (Bandung : Mizan, 2007), 98

merekomendasikan pemerintah untuk berperan aktif dalam melihat perkembangan lembaga pendidikan.⁹

Nilai-nilai historis dan pengkajian ulang secara mendalam ini, dalam pandangan penulis, merupakan asal-muasal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan ini secara umum mengatur Pendidikan Agama dan Keagamaan. Di dalam peraturan ini dijelaskan beberapa konsep penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan juga memayungi dua model pendidikan Islam klasik; Yakni Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Madin). Pengkategorisasian bahwa peraturan ini hadir karena ada upaya intervensi pemerintah dalam mengamputasi kebebasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan – khususnya Agama Islam, adalah adanya standarasasi tingkat satuan pendidikan, penyeragaman kurikulum, pendanaan pendidikan, dan sanksi bagi lembaga pendidikan yang ‘menyeleng’ dari tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan generasi bangsa dan menumbuhkan nilai nasionalisme.¹⁰

Di sisi yang lain, pemerintah beranggapan bahwa keberadaan PP. Nomor 55 Tahun 2007 adalah tuntutan Undang-Undang Sistem Pendidikan

⁹ Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti Puslitbang semenjak reformasi dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana *content* pengajaran dan proses internalisasi nilai-nilai pemurnian agama Islam dari segi tauhid dilakukan oleh Pondok Pesantren yang berafiliasi dengan Arab Saudi atau berada dibawah naungan Kerajaan Saudi. Setidaknya ada lima pondok pesantren yang diteliti oleh Puslitbang di seluruh Indonesia, seperti LIPIA Jakarta, Palembang, Bandung. Sebagian besar pesantren yang menjadi objek penelitian memiliki kurikulum yang sama di dalam mengajarkan Teologi Islam, yakni masalah pemurnian akidah dari syirk besar dan kecil. (Lihat: Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta *Studi Literatur tentang Corak Teologi yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Islam yang berafiliasi ke Arab Saudi* (Jakarta; Puslitbang Depag, 2011)xx

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2007).

Nasional Pada Pasal 30 Ayat 04, yang menyebutkan bahwa “*Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja, samanera, dan bentuk lain sejenis*”.¹¹ Berdasarkan tafsiran pemerintah UU Sisdiknas ini mewajibkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola lembaga pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dari sisi analisa teoritik, keberadaan pendidikan agama dan keagamaan, yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas sebenarnya sudah ada sebelum adanya PP. Nomor 55 tersebut. Pondok Pesantren, misalnya, adalah dialektika kesejarahan kebudayaan Indonesia atau nusantara dengan Islam. Pesantren sudah ada dan berkembang sebelum Indonesia menjadi negara.¹²

Oleh karenanya, bagi penulis keberadaan peraturan ini memberikan dua dampak kecurigaan motif politik dalam konteks pendidikan Islam – khususnya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. *Pertama*, pondok pesantren tidak akan lagi memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya. *Kedua*, adanya peraturan ini, secara implementatif akan dijadikan alat politik kepala daerah dalam upaya meraup suara di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, dan condong pada tradisionalisme. Anggapan *pertama*, sudah penulis gambarkan secara gamblang di atas, bagaimana ada upaya masif untuk menganalisa beberapa pondok pesantren yang radikal dan tidak berasaskan

¹¹ Lembaran Negara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

¹² Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2000), 29.

pada ideologi Pancasila. Adapun anggapan kedua ini, bisa dilihat dari sudut implementasi kebijakan-kebijakan di daerah-daerah tertentu.

Misalnya kebijakan bantuan beasiswa bagi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Kebijakan ini awalnya menuai banyak kritik, baik dari akademisi ataupun sikap pemerintah sendiri. Kritik ini didasarkan pada *pertama*, secara historis, Madrasah Diniyah adalah kelembagaan pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. *Kedua*, ada usaha sistematis untuk memberikan bantuan profesionalisme dan tunjangan bagi guru Madrasah Diniyah, yang secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak diakui dan diatur secara formal. *Ketiga*, adalah tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyebut bahwa bantuan Beasiswa Pendidikan dan tunjangan untuk Guru Madrasah Diniyah inkonstitusional dan tidak berdasar¹³. Formalisasi Madrasah Diniyah yang dilakukan oleh Gubernur lebih condong sebagai implementasi kontrak politik dengan para Kiai pendukungnya. Fakta di lapangan lebih unik, ada beberapa pesantren yang dulunya tidak memiliki Madrasah Diniyah, sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan Madrasah Diniyah agar dapat mengakses anggaran pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa ada satu disiplin ilmu pengetahuan dan satu model pendekatan teoritik yang dapat mengurai benang kusut proses pembentukan kebijakan ini. Yakni disiplin ilmu politik pendidikan, sebagai disiplin ilmu, yang membahas tentang proses

¹³ Lihat Merdeka.com “*Mendagri : APBD dilarang Madrasah Diniyah*”. <http://m.merdeka.com/peristiwa/> (diakses pada 23 Maret 2014)

pembentukan, landasan, dan formulasi kebijakan. Kemudian, akan dianalisis menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Yaitu sebuah teori bisa mengungkap apakah perilaku sosial ini, sengaja digunakan untuk ‘membohongi’ atau ‘mengecoh’ paradigma masyarakat umum atau tidak.

Kata politik pendidikan (*politic of education*), mungkin saja, tidak setenar kata atau *logos*, ‘politisasi’ dunia pendidikan dan pendidikan/sosialisasi politik (*educational politic*). M. Sirozi menggambarkan bahwa kata politik pendidikan tidak sesederhana dua kata selanjutnya. Politik pendidikan, dalam pandangannya, merupakan proses panjang yang membutuhkan keterlibatan struktur, proses perdebatan ilmiah, dan ramalan dampak (*forecasting the effect*), serta strategi yang khusus dalam proses sosialisasinya¹⁴. Sedangkan, politisasi pendidikan adalah strategi politik yang menjadikan dunia pendidikan sebagai *branding* komoditas suksesi politik. Fenomena politisasi pendidikan seringkali terlihat seperti slogan “Pendidikan Gratis” atau “Beasiswa Miskin” pada proses kampanye¹⁵. Adapun yang terakhir adalah pendidikan politik; yakni proses sosialisasi kepentingan politik di dunia pendidikan¹⁶. Contohnya adalah internalisasi pembelajaran politik

¹⁴ M. Sirozi, *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta ; Rajagrafindo Persada, 2010), 80

¹⁵ Beasiswa Presiden adalah sebuah program beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa, aktivis LSM, dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Beasiswa ini diproklamerkan sekitar bulan Maret – yang secara eksplisit bersamaan dengan masa kampanye. Maka, tidak mengherankan di beberapa media masa membentuk *framing* yang mengarahkan; beasiswa ini sebagai bagian dari politisasi pendidikan untuk memenangkan salah satu partai politik. Sangkaan tersebut juga dimaklumi oleh Mendiknas karena bersamaan dengan momentum suksesi calon legislatif. (Lihat Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI www.kemendikbud.org)

¹⁶ Terminologi sosialisasi politik/pendidikan sistem perpolitikan di Indonesia diulas lengkap oleh Azyumardi Azra. Azra di dalam bukunya berusaha untuk membedakan mana proses pembentukan kebijakan politik, dan sosialisasi produk kebijakan yang diinternalisasikan dalam

bagi siswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan sosialisasi politik lainnya, seperti Upacara dan peringatan hari kemerdekaan.

Sebagai wujud kajian disiplin ilmu, politik pendidikan memang tergolong baru, dan bisa jadi, masih dalam proses perumusan. Pasalnya, hubungan politik dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang erat dan sulit dipisahkan. Hal ini sama halnya, seperti mempertanyakan hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Alex Roseberg menganggap bahwa kedua berjalan secara bersama-sama, filsafat terkadang mendahului konsepsi ilmu pengetahuan, namun di abad modern dan post-modern, objek kajian filsafat adalah ilmu pengetahuan¹⁷. Demikian halnya dengan politik dan pendidikan. Awalnya, politik pendidikan terlahir karena kebutuhan domestik dan kebutuhan teritori negara tertentu, namun pada perkembangannya, pendidikan menjadi kepentingan global. Imbasnya, politik (baca; kebijakan) pendidikan lokal harus disesuaikan dengan kaedah dan fitur mitos globalisasi. Politik pendidikan regional tidak selalu mementingkan kebutuhan nasional, melainkan pembangunan dunia global¹⁸.

Kondisi ini, menurut Charlos Alberto Torres, mengutip Siegel & Weinberg, meupakan *concern* kajian politik pendidikan untuk membuka tabir landasan atau fondasi pemikiran yang mempengaruhi kebijakan politis

lembaga pendidikan. Secara sederhana, sosialisasi pendidikan dapat dicontohkan seperti pembelajaran tentang kewarganegaraan, demokrasi, sistem pemerintahan, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini berbeda dengan politik penyelenggaraan pendidikan yang sarat dengan muatan kepentingan *elite* politik. Lihat: Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 156.

¹⁷ Alex Roseberg *Philosopy of Science* (New York: Routledge, 2001), 12

¹⁸ Keith A. Nitta, *The Politic of Structural Education Reform* (New York; Routledge, 2008), 1-2

tersebut? apakah kebijakan diformulasi untuk kepentingan nasional atau mengikuti arus global (*international linkage*), atau hanya sebagai bagian dari komoditas politik yang tidak memiliki *goal of accievement* ?¹⁹. Dale (dalam Sirozi), menambahkan bahwa kajian politik pendidikan memiliki ciri ; *pertama*, mempertanyakan proses pembuatan keputusan, *kedua*, mereduksi politik menjadi administrasi, dan *ketiga*, terfokus pada perangkat kerja kebijakan²⁰. Selain itu, politik pendidikan juga mengkaji efektifitas korelasional antara yang dikonsepsikan dengan fakta di lapangan.

Adapun pendekatan teori Hegemoni Antonio Gramsci.²¹ Teori Hegemoni, sebenarnya, terlahir dalam sistem pemerintahan otoritativ. Di Italia, misalnya, teori ini hadir di saat Macheavelli, Lenin dan Stalin berkuasa. Keberadaan Hegemoni, kala itu, dianggap sebagai sistem yang mengikat masyarakat untuk mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun, pasca post-modernisme dan neo-positivisme berkembang, Teori Hegemoni, tidak lagi

¹⁹ Charles Alberto Torres, "The Capitalist State and Public Formation; Framework for a political sociology of educational policy making" dalam "Stephen A. Ball *Falmer of Sociology of Education* (New York; London Catalogues, 2005) 157

²⁰ M. Sirozi *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan...*,84

²¹ Gramsci lahir di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia, Italia, pada 22 Januari 1891. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Ia berasal dari sebuah keluarga yang tidak terlalu miskin, ayahnya adalah seorang kolonel dari Naples. Kondisi Sardinia sebagai daerah miskin dan terbelakang, memotivasi keluarga Gramsci untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, keinginan itu pupus ketika sang ayah dipecat dari pekerjaannya karena diduga melakukan kecurangan administrasi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sang ibu terpaksa menjadi tukang jahit, sedangkan Gramsci dan saudaranya, Genaro, mengabdikan kantor bekas ayahnya bekerja. Pada tahun 1911, sebuah keberuntungan menyapa Gramsci, ia memenangkan perolehan beasiswa di sebuah Universitas di Turin, Italia. Pada masa-masa menjadi mahasiswa, ia tertarik pada aktifitas politik dan gerakan buruh di Turin. Pada 1913, ia bergabung dengan Partai Sosialis Italia. Pada 1924, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia (PCI), setelah dua tahun sebelumnya, 1922-1923, ia dipercaya sebagai wakil PCI di Moskow. Setelah dua menjabat Sekjen PCI, pada 1926 ia ditangkap dan dipenjara selama 20 tahun 4 bulan 15 hari. Di dalam penjara itulah, ia menulis idenya tentang hegemoni. Akhirnya pada 27 April 1937, ia meninggal di dalam penjara di Roma. Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

berwujud dalam konteks ‘pemaksaan’ sistemik, melainkan berbentuk usaha mempengaruhi dibalik kesadaran manusia. Dalam disiplin ilmu sosial, sering dijadikan *scientific baseline* (pijakan keilmuan) untuk mengurai fenomena politik negara tertentu, begitu halnya kasus politik pendidikan.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, teori hegemoni di era post modern, dimaknai oleh Benedetto Fontana sebagai mendeterminasi dalam wujud proses menjadi manusia (*becoming human being*). Inilah, yang menurutnya, berbeda dengan kajian-kajian politik pemerintahan sebelumnya, yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan (*humanity*). Benedetto Fontana menyebutkan perbedaan cara pandang Gramsci sebagaimana berikut:

“Interpreters of Gramsci have rightly noted that his political philosophy is fundamentally humanist – or rather, as he himself puts it, “neo-humanist.” Human beings, for Gramsci, are not “givens” whose nature is immutable and fixed: they are not “essences” whose existence is already determined. They are a “becoming,” ineradicably rooted in the historical process. Indeed, human beings are history, both as actors who through their practical activities make history, both as actors who through their practical activities make history, and as thinkers who contemplate themselves in history. Gramsci’s political theory, therefore, is a discourse on the genesis and formation of the historical subject. It is precisely this view of “political agents” who posit themselves and create themselves in and through historical action that led Gramsci to reject contemporary interpretations of marxism, which he criticized as mechanistic and deterministic.²²

Kutipan ini, setidaknya bermakna, Gramsci ingin berupaya memberikan pemahaman baru tentang Hegemoni. Dia (Gramsci) lebih cenderung menganggap bahwa manusia dalam prosesnya selalu dibentuk berdasarkan dialektika-historis yang kompleks. Seseorang yang sudah menjadi manusia

²² Benedetto Fontana, *Gramsci Hegemony and Power Machiavelli*, (London; Minnesota Press, 1993), 6

(*becoming human*) tidak menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari rangkaian kesejarahan yang sengaja dibentuk. Mereka bertindak tidak sesuai dengan konsepsi pribadinya, melainkan konstruksi orang lain.

Berkaitan dengan keterikatan Teori Hegemoni dan pendidikan, dijelaskan oleh Peter Mayo, sebagaimana di bawah ini:

Education is central to the workings of hegemony in which every relationship is a pedagogical relationship. In other words, to do justice to Gramsci's work holistically and not confine to the tract on schooling, or more precisely 'the Unitarian School', found in Notebook 4 and revised in Notebook 12. Gramsci's pre-prison writings are also of great relevance here, together with some of his letters, since Gramsci accorded different forms of education, including adult education, great importance, considering their organization to be a key task of the Modern Prince that is the revolutionary party,²³

Peter Mayo ingin mengatakan bahwa menurut Gramsci pendidikan adalah bagian dari hegemoni yang diikat dalam konteks bentukan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan, secara organisasional, selalu memiliki nilai dan tujuan yang bisa saja mengikat perilaku bebas manusia. Oleh karenanya, Gramsci sendiri disaat berbicara tentang pendidikan lebih menekankan pada aspek memanusiakan manusia dan kreativitas.

Berdasarkan konsepsi teori politik pendidikan, bentuk kebijakan (*policy*) dan pendekatan Hegemoni Antonio Gramsci penelitian ini berjudul "Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci; Telaah terhadap PP. No 55 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan". Dikarenakan peraturan mencakup seluruh agama dan institusi

²³ Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought*, (Chichester UK; Blackwell Publishing 2010) 1-2

keagamaan. Maka, penelitian ini akan penulis batasi hanya pada aspek Pendidikan Islam; Yakni Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Tujuannya, kedua lembaga ini, sesuai sistem pendidikan Nasional, dikategorikan sebagai pendidikan non-formal yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui swadaya masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang Lahirnya PP. No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan?
2. Bagaimanakah Politik Pendidikan Islam PP. No 55 tahun 2007 dalam perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan latar belakang terbitnya PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
2. Menjabarkan politik pendidikan islam PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan berdasarkan Teori Hegemoni Antonio Gramsci.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua kemanfaatan dari pelaksanaan penelitian tentang konsep politik pendidikan Islam perspektif Antonio Gramsci , yakni kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pendidikan Islam secara umum, dalam perpektif yang berbeda; yakni sosiologis.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada berbagai institusi atau kalangan sebagai berikut:

1. Masyarakat umum; hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi upaya-upaya pengembangan konsep-konsep politik pendidikan Islam.
2. UIN Sunan Ampel Surabaya; hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur bagi keluarga besar PPs UIN Sunan Ampel baik sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan dan pemikiran tentang konsep politik pendidikan Islam maupun sebagai bahan pustaka bagi penyusunan tesis atau makalah.
3. Peneliti; pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan di UIN Sunan Ampel. Selain itu hasil penelitian ini tentu dapat memberikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran peneliti mengenai konsep politik pendidikan Islam dalam pembentukan formalisasi pendidikan agama dan keagamaan dengan latar pendekatan sosiologis.

E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, ada hal yang perlu ditegaskan lebih awal, yakni penelitian-penelitian tentang Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah – sesuai dengan batasan penelitian ini, lebih banyak diarahkan pada aspek pengelolaan (manajemen) lembaga pendidikan dan proses pembelajaran di dalamnya. Sangat sedikit – sebagaimana hasil *tracing* penulis – yang

berkaitan dengan konstruksi kebijakan pemerintah tentang Madrasah Diniyah. Padahal, lembaga ini sebenarnya tergolong sebagai lembaga non-formal yang terlembagakan, berbeda dengan Madrasah Ibtidaiyah dan tingkat selanjutnya. Berikut adalah salah satu dari penelitian yang memiliki kemiripan dengan konteks penelitian penulis:

1. Ainur Rofiq, *Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur*; Tulisan ini merupakan penelitian yang kemudian dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah FALASIFA Vol. 1 Maret 2011. Dalam penelitian ini, Airnur Rofiq berusaha menjelaskan tentang proses pembentukan kebijakan tentang peningkatan kualitas Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur, berdasarkan pada pandangan para Ahli dan manuskrip kebijakan yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur. Penelitian Ainur Rofiq ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif lapangan²⁴.
2. Sholehuddin, *Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru; Sebuah Inspirasi dalam mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementrian Agama tentang pendidikan di Era Reformasi*. Penelitian ini menggunakan kajian historis-kontekstual. Artinya, penulisnya berusaha untuk menggali ulang apa yang sudah diimplementasikan di zaman orde baru, dan mencari kesesuaiannya di

²⁴ Ainur Rofiq, "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terhadap Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur;" dalam *Jurnal Ilmiah FALASIFA* Vol. 1 Maret 2011

era demokratis. Salah satu point penting dalam konteks ini adalah perodesasi pembentukan kebijakan-kebijakan politik pemerintah di dua zaman yang berbeda. Dari era yang penuh dengan ketertutupan, hingga di era keterbukaan tanpa batas seperti saat ini²⁵.

3. Moh. Hefni. *Runtuhnya Hegemoni dalam Menentukan Kurikulum Pesantren*. Tulisan ini diterbitkan dalam Jurnal KARSA Vol IXI 1 April 2011. *Stressing Point* dalam penelitian ini adalah kekuatan teori hegemoni dalam menentukan arah kebijakan. Artikel ilmiah ini juga menjelaskan dengan sangat *detail* proses implementasi hegemoni yang berusaha dilakukan oleh pemerintah. Namun, mendapatkan hambatan ideologis dan historiografi yang sangat kuat yang dimiliki oleh pondok pesantren. Pada kesimpulannya disebutkan bahwa, proses penyeragaman kurikulum yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah dalam lembaga pendidikan formal, tidak mampu menyentuk pendidikan pondok pesantren. Hegemoni kekuasaan pemerintah tidak mampu meruntuhkan kekuatan dan kekuasaan Kiai dalam proses penyelenggaraan pendidikan pesantren²⁶.

Perbedaan utama, kajian terdahulu yang sudah dilakukan dengan penelian ini, adalah *pertama*; penelitian ini berfokus pada politik pendidikan berbentuk kebijakan pemerintah, yang ditinjau dengan paradigma post-modern (kritis). *Kedua*, ekses kebijakan pendidikan pendidikan yang ditengarai

²⁵ Sholehuddin, *Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru; Sebuah Inspirasi dalam mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementrian Agama tentang pendidikan di Era Reformasi*. Sumber www.google scholar. (diakses 23 Maret 2014)

²⁶ Moh. Hefni. Runtuhnya Hegemoni dalam Menentukan Kurikulum Pesantren. dalam Jurnal KARSA Vol IXI 1 April 2011

sebagai usaha masif dalam menghegemoni masyarakat untuk mengingat satu kekuatan politik baru serta tawaran baru dalam menformulasi kebijakan berdasarkan pada paradigma hegemonik.

F. Definisi Operasional

1. Politik pendidikan Islam

Politik pendidikan terdiri dari dua kosa kata dan disiplin ilmu. Term politik sering dimaknai secara bervariasi sesuai dengan sudut pandang orang yang melihatnya. Di dalam perkemabangannya, pengertian politik semakin meluas dan tidak mungkin memperoleh makna tunggal. David Easton mendefinisikan politik sebagai serangkaian interaksi manusia; *a set of human interaction*. Namun ia membatasinya dengan menekan pada alokasi yang berwenang bagi seluruh masyarakat.²⁷ Karl Deuth memaknai politik sebagai pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat : *politics is the making of decision by public means*.²⁸ Rumusan yang nyaris serupa dengan Deutch, dikemukakan oleh Joice dan William Mitchell yang mengatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau kebijakan-kebijakan publik bagi seluruh masyarakat.²⁹

Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani

²⁷ Abdul Rasyid Moten, *Political Science : An Islamic Perspective*, (London: MacMillan Press LTD, 1996), 18

²⁸ Karl, W. Deuth, *Politics and Government; How people Decide Their fate*, (Boston: Houghton Mifflin, 1970), 5

²⁹ Joice M. Mitchell & William C. Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political science*, (Chicago: Rand Mc. Nally. 1969), 4

dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama.³⁰ Sedangkan Zuhairini mendefinisikan pendidikan dengan aktivitas atau mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, namun mencakup aspek non-formal.³¹

Adapun kombinasi dua terminologi di atas, disebutkan oleh Kimbrough (dalam M. Sirozi) sebagai berikut:

“(dia) setuju dengan istilah politik pendidikan (*the politics of education*) dan melandasi penjelasannya pada pengertian politik itu sendiri. Ia setuju dengan Kammerer bahwa politik adalah ‘*the process of making significant community-wide decisions*’ (proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas’. Bertitik tolak dari pengertian itu, (dia) berpendapat bahwa politik pendidikan merupakan; ‘*the process of making basic educational decisions of local district-wide, state-wide, or nation-wide significance*’ (proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional). Bagi (dia), pada dasarnya pendidikan publik bersifat politis. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam manajemen pendidikan publik adalah para politisi manakala mereka menuntut keputusan melalui proses politik”³².

Berdasarkan pada pendefinisian di atas, setidaknya ada dua *stressing point*; politik pendidikan adalah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (elite politik) berdasarkan pada landasan-landasan filosofis dan undang-undang yang diatur secara bersama-sama. Selanjutnya, politik pendidikan akan memiliki dampak

³⁰ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: NU al-Ma’arif, 1982), 16

³¹ Zuhairini, dkk., *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) 149

³² M. Sirozi *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan...*, 82

yang luas terhadap masyarakat (*society*) atau publik. Dampak kebijakan, secara teoritik, bisa saja mengalami progresifitas dan efektivitas apabila dilaksanakan dan diimplementasikan secara benar. Namun, juga sebaliknya akan ada digresi apabila kebijakan tersebut tidak efektif.

2. Teori hegemoni

Hegemoni (bahasa Yunani: *hegemonía*) pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi negara terhadap negara lain. Namun saat ini, kepemimpinan tersebut menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara 'pemimpin'. Bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, sesuatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang bersifat memaksa³³.

Teori hegemoni tidak bisa dilepaskan dari tokoh Antonio Gramsci. Ia adalah pemegang hak paten perbincangan konsep hegemoni. *Startingpoint* konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif)

³³ Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977)

yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim. Sedangkan hegemoni dilakukan secara persuasif dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai pikiran kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya, tanpa adanya paksaan³⁴.

Hegemoni ini diraih secara politis melalui upaya-upaya moral dan intelektual untuk menciptakan keseragaman pandangan dalam sebuah masyarakat kelompok lain, yang di dalamnya termasuk kritikus borjuis, petani, dan intelektual ke dalam sebuah gerakan. Kesadaran kelompok-kelompok ini bagi Lenin merupakan modal utama untuk menggulingkan Tsarisme. Lenin menyebarkan pengetahuan politik kepada para pekerja dan membaurkan para pengikut Partai Sosial Demokrat dengan segala kelas di masyarakat untuk mencapai kesadaran yang ia inginkan³⁵.

3. Pendidikan Keagamaan Islam dalam PP. No. 55 2007.

Berdasarkan PP. Nomor 55 Tahun 2007 setidaknya ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menjadi cakupan peraturan pemerintah ini. Misalnya, Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Pondok Pesantren, dan Madrasah Diniyah. Dalam konteks penelitian ini; hanya ada dua aspek yang akan penulis teliti. Yakni Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Mukti Ali mendefinisikan Pondok Pesantren bukan lembaga

³⁴ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115-116.

³⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19.

kemasyarakatan, meskipun orang-orang di pesantren mengayomi, mendampingi, dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Pondok Pesantren adalah *Lembaga Pendidikan Islam* yang di dalamnya menyeleksi dan menggembleng para calon ulama' dan kiai. Meskipun, peranan pesantren juga bisa sebagai lembaga dakwah, lembaga sosial, dan lembaga perekonomian.³⁶

Adapun kata madrasah adalah bentuk kata “keterangan tempat”. Dari akar kata “*darasa*”, secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau “tempat untuk memberikan pelajaran”, dari akar kata “*darasa*” juga bisa diturunkan kata “*midras*” yang mempunyai arti “buku yang “dipelajari” atau “tempat belajar”; kata “*al-midras*” yang mempunyai arti “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar” kata “*al-midras*” juga diartikan sebagai “rumah untuk mempelajari kitab Taurat” dari kedua bahasa tersebut, kata “madrasah” memiliki arti “sekolah” kendali pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola.³⁷ Secara harfiah madrasah bisa juga diartikan dengan sekolah, karena secara harfiah madrasah bisa juga diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian istilah madrasah memiliki makna yang berbeda dengan istilah sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang

³⁶ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta; Rajawali Press, 1987), 15-

³⁷ H. A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3I, 1998), III

berdeda³⁸, madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya, sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sumber Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber-sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Kajian pustaka biasanya menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Moeleong adalah, prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹ Desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana atau stuktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitiannya.⁴⁰

Sumber primer penelitian ini dispesifikasikan lagi menjadi tiga tema besar, yaitu: a) Politik Pendidikan; b) Teori Hegemoni Antonio Gramsci; c) Konsepsi dan Manuskrip Landasan Kebijakan politik PP. No 55 2007. Pada

³⁸ Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta LP3ES: 1986). 44

³⁹ Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 3

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 75

masing-masing kategori ini, peneliti akan menggunakan sumber-sumber primer terpercaya yang relevan dengan topic penelitian. Sedangkan sumber sekunder meliputi literatur-literatur ilmu sosiologi-politik dan ilmu pendidikan Islam.

Selain sumber-sumber primer dan sekunder di atas, peneliti juga akan menggunakan sumber-sumber data lainnya dalam upaya mewujudkan hasil penelitian yang lebih sempurna, baik dalam bentuk karya ilmiah (tesis, disertasi), artikel di internet, dan sumber-sumber data yang relevan lainnya.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Secara detail, langkah-langkah penelitian yang akan peneliti tempuh meliputi 3 langkah, yaitu:

Langkah pertama, peneliti menyajikan landasan teori. Bagian ini sangat krusial mengingat posisinya sebagai *frame of thinking* yang akan melandasi keseluruhan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan berupaya menyajikan teori-teori yang relevan dengan pendekatan deskriptif-analitik, khususnya dengan tema besar politik pendidikan, kerangka besar teori hegemoni, serta konsepsi perumusan kebijakan.

Langkah kedua, paparan data. Di sini peneliti akan menyajikan data-data yang terkait dengan landasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam konteks nasional, dan problematikan konstitusionalnya.

Langkah ketiga, analisis data. Peneliti akan menganalisis paparan data yang dikomparasikan dengan landasan teori, dalam rangka menemukan formulasi neraca nuanasi politik pendidikan atau domain politisasi

pendidikan. Selain berwujud formulasi teoritik, peneliti juga akan menyajikan contoh aplikatifnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan *standart* untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data ini merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter atau studi dokumenter. Karena dalam penelitian kualitatif, teknik dokumenter merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan (sintesa), sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.⁴¹ Sedangkan dokumen-dokumen yang dihimpun dan dianalisis oleh peneliti dalam skripsi ini adalah data-data primer dan sekunder yang berhasil dihimpun.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebelum data tersebut diproses untuk kemudian ditafsirkan (disimpulkan), maka perlu dilakukan pengecekan ulang sehingga data

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kredibilitasnya. Dalam menguji keabsahan data ini peneliti menggunakan beberapa metode, di antaranya: pemeriksaan sejawat, konsultasi dengan para ahli dan diskusi dengan orang yang berkompeten dalam bidang yang diteliti.

Pemeriksaan sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara yang telah diperoleh, untuk kemudian dilakukan diskusi analitis dengan teman-teman sejawat. Yang dimaksudkan teman sejawat adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana disarankan oleh data.⁴² Menjadi suatu kelaziman, di dalam sebuah proses terdapat teknik yang digunakan. Demikian halnya dalam analisis data ini juga terdapat teknik yang digunakan.

- a. Interpretasi, yaitu melakukan penafsiran-penafsiran terhadap teks dengan mengkontekskannya dengan kondisi di masa lalu dan sekarang.⁴³
- b. Analisis Normatif, dari kesimpulan yang diperoleh kemudian dipadankan dengan konsep-konsep guru.

⁴² Lexy J Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103

⁴³ Anton Baker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990), 26

- c. Analisis Induktif, sering disebut penalaran induktif yaitu pembahasan dari data-data khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁴⁴

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Adapun BAB II Tinjauan Pustaka yang akan membahas 1) Terminologi Politik Pendidikan, mencakup kajian di dalamnya, Pengertian Politik Pendidikan Islam, Fokus dan Tujuan Kajian Politik Pendidikan, Problematika Kajian Politik Pendidikan, dan Corak Kajian Politik Pendidikan. 2) Pendidikan Agama dan Keagamaan. Di dalam pembahasan ini terdapat dua sub-bahasan; Memaknai Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

Pada BAB III Teori Hegemoni, Antonio Gramsci, dan Pendidikan. Masuk dalam pembahasan ini adalah biografi singkat Antonio Gramsci, Key Concept Pemikiran Antonio Gramsci, Teori Hegemoni Gramsci dan Pendidikan.

BAB IV Politik Pendidikan dalam perspektif Teori Hegemoni. Berisikan tentang penjelasan tentang PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan. Pembahasan selanjutnya adalah

⁴⁴ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jogjakarta: Andi Ofsett, 1990), 42

implementasi PP. No. 55 Tahun 2007 dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci.

BAB V akan berisi Penutup, yang didalamnya adalah kesimpulan, dan saran-saran.